

The Effects of Economic Growth, Open Unemployment Rate, Investment, and Human Development Index on Poverty in the Kalimantan Region

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Regional Kalimantan

Sukma Rani Safitri¹, Muzdalifah²

Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

¹2320317320003@mhs.ulm.ac.id, ²Muzdalifah.feb@ulm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effects of economic growth, the Open Unemployment Rate (TPT), investment, and the Human Development Index (HDI) on poverty in the Kalimantan Region, both partially and simultaneously. This study employs a quantitative approach using relevant secondary data reflecting the socioeconomic conditions of the Kalimantan Region. The analysis was conducted to determine the contribution of each independent variable to poverty levels and their combined effects. The results show that, partially, economic growth has a positive and significant effect on poverty. This finding indicates that the economic growth occurring in the region has not yet been fully inclusive and has not been able to provide equitable benefits to the poor. The Open Unemployment Rate and investment have no significant effect on poverty, while the Human Development Index has a negative and significant effect on poverty. This finding indicates that improving human resource quality through education, healthcare, and living standards is an important factor in reducing poverty in the Kalimantan Region. Simultaneously, economic growth, the Open Unemployment Rate, investment, and the Human Development Index have a significant effect on poverty. Therefore, poverty alleviation policies should focus on improving the quality of education, healthcare, and living standards, accompanied by inclusive economic development, improved employment opportunities and job quality, and strengthened investment that supports the local economy. These strategies are expected to promote sustainable poverty reduction in the Kalimantan Region.

Keywords: Economic Growth; Open Unemployment Rate; Investment; Human Development Index; Poverty; Kalimantan Region.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Regional Kalimantan, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi di Regional Kalimantan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan serta pengaruhnya secara bersama-sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat miskin. Tingkat Pengangguran Terbuka dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup merupakan faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Regional Kalimantan. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, disertai dengan pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas dan kesempatan kerja, serta penguatan investasi yang berpihak pada ekonomi lokal. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan secara berkelanjutan di Regional Kalimantan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi; Tingkat Pengangguran Terbuka; Investasi; Indeks Pembangunan Manusia; Kemiskinan; Regional Kalimantan.

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu permasalahan sosial-ekonomi

utama yang masih dihadapi adalah kemiskinan. Di Regional Kalimantan, terdapat kesenjangan antara capaian makroekonomi dan pengentasan kemiskinan. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi tinggi, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, belum menunjukkan penurunan kemiskinan yang sebanding. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif dan manfaat pembangunan belum merata.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 sebesar 9,03%, menurun dari 9,36% pada Maret 2023. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi sekitar 25,22 juta jiwa. Namun, pertumbuhan penduduk sebesar 0,56% atau sekitar 1,53 juta jiwa menyebabkan kelompok rentan miskin masih menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan.

Di Regional Kalimantan, rata-rata persentase kemiskinan tahun 2024 sebesar 5,54%, menurun dari 5,73% pada tahun sebelumnya (BPS, 2024). Meskipun seluruh provinsi mengalami penurunan kemiskinan selama 2019–2024, tingkat kemiskinan masih berada pada kisaran 4,11–6,32%. Perbedaan antarwilayah menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual. Kondisi tersebut menjadi paradoks karena Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam dan merupakan salah satu pusat investasi nasional, tetapi masih menghadapi persoalan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Regional Kalimantan pada 2023–2024 relatif stabil pada kisaran 4–6% (BPS, 2024). Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberikan manfaat bagi masyarakat miskin apabila distribusi pendapatan tidak merata. Hal ini sejalan dengan Todaro & Smith (2020) dan Ammaliah & Suherty, (2024) melalui *Trickle Down Effect Theory* yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat miskin melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. Sementara itu, teori pertumbuhan neoklasik Solow-Swan (1956) menjelaskan bahwa akumulasi modal, tenaga kerja, dan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan kemiskinan dalam jangka panjang.

Investasi di Kalimantan menunjukkan tren peningkatan selama 2019–2024, terutama di Kalimantan Timur yang meningkat dari Rp29,58 triliun menjadi Rp77,55 triliun akibat pembangunan IKN serta ekspansi sektor energi dan pertambangan (Badan Koordinasi Penanaman Modal Kalimantan, 2024). Meskipun demikian, dominasi investasi pada sektor padat modal menyebabkan penciptaan lapangan kerja relatif terbatas sehingga manfaat ekonomi belum merata.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan pada 2020–2021 akibat pandemi Covid-19, kemudian menurun secara konsisten hingga 2024 (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan pentingnya penciptaan lapangan kerja produktif dalam menekan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa tingginya pengangguran menurunkan pendapatan agregat masyarakat dan dapat memperburuk kemiskinan.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting kualitas sumber daya manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Menurut Sen (1999) melalui *Human Development Theory*, peningkatan kapabilitas manusia memperluas akses terhadap peluang ekonomi sehingga masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. IPM seluruh provinsi di Kalimantan mengalami peningkatan selama 2019–2024, meskipun masih terdapat kesenjangan antarprovinsi (BPS, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap, yaitu kesenjangan antara indikator makroekonomi dengan kesejahteraan masyarakat secara riil. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penurunan pengangguran seharusnya berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Namun, realitas di Kalimantan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan investasi yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Kondisi ini mencerminkan adanya *theoretical gap* antara teori *pro-poor growth* dan *trickle-down effect* dengan realitas pembangunan di Kalimantan. Selain itu, terdapat *time gap* karena sebagian penelitian sebelumnya menggunakan data sebelum 2022, sementara kondisi ekonomi Kalimantan telah mengalami perubahan akibat pandemi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Regional Kalimantan penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami fenomena *impoverishing growth*, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mampu menurunkan kemiskinan secara optimal, serta memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan.

2. Metode

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam ranah ekonomi pembangunan dengan fokus pada hubungan pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif asosiatif dengan regresi data panel pada lima provinsi di Kalimantan selama periode 2014–2024. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi, TPT, investasi, IPM, dan kemiskinan di Regional Kalimantan selama 2014–2024 (Sugiyono, 2019). Pendekatan asosiatif digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi, TPT, investasi, dan IPM terhadap kemiskinan sebagai variabel dependen (Sugiyono, 2019).

Data penelitian berbentuk data panel yang merupakan gabungan *cross section* dan *time series*. Data *cross section* terdiri atas lima provinsi di Kalimantan, sedangkan data *time series* mencakup periode 2014–2024. Pendekatan kuantitatif diharapkan menghasilkan temuan yang objektif, valid, dan reliabel sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah (Creswell, 2018).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada lima provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Data yang digunakan berupa data sekunder periode 2014–2024 yang diperoleh dari situs resmi BPS masing-masing provinsi.

Unit Analisis

Unit analisis penelitian adalah pemerintah provinsi pada lima provinsi di Regional Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian terhadap berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, BPS, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta literatur dan informasi tertulis dari instansi terkait maupun internet. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan periode *time series* 2014–2024 dan *cross section* lima provinsi di Kalimantan. Tahun 2025 tidak digunakan karena sebagian data provinsi hanya tersedia hingga tahun 2024. Data utama penelitian bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Model Data

Uji Chow

Pengujian pada model ini dilakukan dengan membandingkan *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)*. Untuk menentukan model yang paling sesuai, dilakukan *uji Chow* dengan melihat nilai *probabilitas Cross-section F* pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%). Jika nilai *probabilitas Cross-section F* lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima, yang berarti model *Fixed Effect Model (FEM)* lebih tepat digunakan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, sehingga model yang sesuai adalah *Common Effect Model (CEM)*.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	df	Prob.
Cross-section F	50.254746	(4,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	92.445308	4	0.0000

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai *Cross-section F* sebesar 50.254746 dengan probabilitas 0,0000, serta nilai *Cross-section Chi-square* sebesar 92.445308 dengan probabilitas 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Hal ini berarti terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan antarprovinsi di Kalimantan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga pendekatan efek tetap lebih relevan dibandingkan model efek umum.

Uji Hausman

Hasil dari Uji Chow menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *Fixed Effect Model (FEM)* dibandingkan *Common Effect Model (CEM)*, langkah selanjutnya adalah melakukan *Uji Hausman* untuk menentukan apakah model *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)* yang lebih sesuai digunakan dalam analisis.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. df	Prob.
Cross-section random	201.018982	4	0.0000

Sumber: data diolah 2025

Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 . Model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil ini menegaskan bahwa perbedaan karakteristik antarprovinsi di Kalimantan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan tidak bersifat acak, melainkan memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, FEM lebih akurat dalam menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, investasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam suatu model regresi adalah dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel independen pada output hasil analisis. Jika terdapat nilai korelasi yang lebih besar dari 1, maka hal tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya multikolinearitas dalam model.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	PE	TPT	INVESTASI	IPM
PE	1	0.48123019 36110553	0.053696580181 62473	0.2256923452792 348
TPT	-0.4812301936110553	1	0.322707046352 725	0.4467262120385 94
INVESTASI	- 0.0536965801816247 3	0.32270704 6352725	1	0.7067348261119 229
IPM	-0.2256923452792348	0.44672621 2038594	0.706734826111 9229	1

Sumber: data diolah 2025

Hasil uji korelasi antarvariabel menunjukkan bahwa sebagian besar nilai korelasi antarvariabel independen lebih kecil dari 1. Nilai korelasi terbesar terdapat antara Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia yaitu sebesar 0,7067, namun angka tersebut masih di bawah ambang batas 1. Disimpulkan bahwa pada model tidak terjadi multikolinearitas, sehingga model regresi dapat digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dalam model dilihat hasil uji *Glejser* pada output analisis. Jika nilai lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (data bersifat homoskedastis). Namun, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-----------	------------	-------------	-------

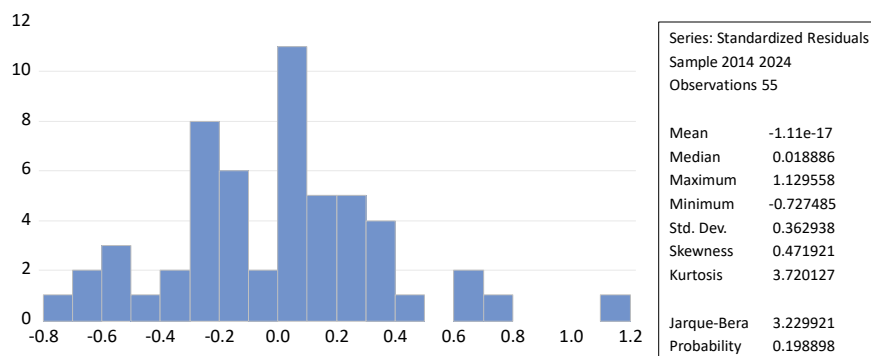
C	0.577514	1.221820	0.472667	0.6387
PE	0.012605	0.012194	1.033759	0.3067
TPT	0.012748	0.047019	0.271126	0.7875
LOG(INVESTASI)	-0.052460	0.077093	-0.680473	0.4996
IPM	0.000888	0.017019	0.052150	0.9586

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diketahui bahwa nilai probabilitas untuk masing-masing variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3067, tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,7875, log investasi sebesar 0,4996, dan indeks pembangunan manusia sebesar 0,9586, semuanya berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa varians dari error term bersifat konstan atau homogen (homoskedastisitas). Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik yang penting, sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat dianggap valid, efisien, dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis selanjutnya.

Uji Normalitas

Data residual berdistribusi normal dengan melihat hasil uji *Jarque-Bera* (JB Test) pada output analisis. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* lebih besar dari 0,05, maka data residual dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal, yang berarti model tidak memenuhi asumsi klasik normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber: data diolah 2025

Hasil uji *Jarque-Bera* sebesar 3.23 dengan probabilitas 0.1989 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen mengindikasikan bahwa tidak ada alasan statistik untuk menolak hipotesis nol mengenai normalitas residual. Dengan demikian, residual model dinyatakan berdistribusi normal dan model telah memenuhi salah satu asumsi penting dalam regresi panel.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Penilaian dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi pada model tersebut.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.042349	0.041688	-1.015849	0.3148
RESID_LAG	0.024497	0.101381	0.241632	0.8101

Sumber: data diolah 2025

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa koefisien RESID_LAG sebesar 0,0245 dan nilai probabilitas 0,8101 yang jauh melebihi tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa model tidak menunjukkan adanya autokorelasi serial pada residual. Hal ini mengindikasikan bahwa kesalahan regresi bersifat acak dan tidak saling berkaitan antar periode waktu, sehingga asumsi non-autokorelasi terpenuhi.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan dari pemilihan model estimasi persamaan regresi dari Uji Chow dan Uji Hausman, antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) maka *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih untuk persamaan regresi linier data panel. Model estimasi yang didapat dari *Fixed Effect Model* (FEM) dijabarkan sebagai berikut:

$$KMS_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 INV_{it} + \beta_4 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$KMS = 18.221 + 0.041PE - 0.005TPT + 0.054INV - 0.180IPM + [CX=F]$$

Tingkat kemiskinan memiliki nilai konstanta 18,221, menurut hasil persamaan dengan data panel regresi linier sebelumnya. Dengan demikian, nilai tingkat kemiskinan adalah 18,221 jika variabel independen lainnya memiliki nilai konstan. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,041, dengan asumsi kondisi variabel independen lainnya konstan, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemiskinan di Regional Kalimantan sebesar 0,041 persen. Koefisien regresi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar -0,005 artinya setiap peningkatan 1 persen TPT akan menurunkan tingkat kemiskinan di Regional Kalimantan sebesar 0,005 persen dengan asumsi kondisi variabel independen lain nilainya konstan. Koefisien regresi investasi sebesar 0,054 artinya setiap peningkatan 1 miliar investasi akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Regional Kalimantan sebesar 0,054 persen dengan asumsi kondisi variabel independen lain nilainya konstan. Koefisien regresi IPM sebesar - 0.180 artinya setiap peningkatan 1 persen IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan di Regional Kalimantan sebesar - 0.180 persen dengan asumsi kondisi variabel independen lain nilainya konstan.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

Statistik	Hasil
R-squared (Weighted)	0.936310
Adjusted R-squared	0.925234
F-statistic	84.53127

Prob(F-statistic)	0.000000
S.E. of regression	0.393234
Sum squared resid	7.113100
Durbin-Watson	1.043738

Sumber: data diolah 2025

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai F-statistic sebesar 84.53127 dengan probabilitas 0.000000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, TPT, investasi dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kalimantan periode 2014–2024.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 6. Hasil Uji Parsial

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C (Konstanta)	18.22078	1.901559	9.582024	0.0000
PE	0.041160	0.019701	2.089179	0.0423
TPT	-0.005222	0.077490	-0.067393	0.9466
LOG(INVESTASI)	0.054384	0.123210	0.441396	0.6610
IPM	-0.180066	0.027676	-6.506110	0.0000

Sumber: data diolah 2025

Hasil estimasi uji parsial diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$\text{KEMISKINAN} = 18.2207827319 + 0.0411596184236 (\text{PE}) - 0.00522225977868 (\text{TPT}) + 0.0543842255496 (\text{LOG(INVESTASI)}) - 0.180065815842 (\text{IPM}) + [\text{CX}=\text{F}]$$

Hasil estimasi Panel EGLS dengan efek tetap menunjukkan variasi kemiskinan di Kalimantan selama periode 2014–2024 dipengaruhi secara berbeda oleh variabel ekonomi.

- Nilai konstanta sebesar 18,22 mencerminkan tingkat kemiskinan dasar di kelima provinsi sebelum mempertimbangkan faktor penjelas lainnya.
- Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien positif 0,041 dan signifikan pada tingkat 5 persen, mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian belum mampu menurunkan kemiskinan, bahkan cenderung berkaitan dengan kenaikan angka kemiskinan. Temuan ini menggambarkan bahwa pertumbuhan di Kalimantan masih belum inklusif dan manfaatnya belum menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan koefisien negatif kecil $-0,005$, namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa perubahan pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh nyata terhadap kemiskinan dalam model ini. Kondisi ini dapat terjadi karena sebagian besar penduduk miskin di Kalimantan berada di sektor informal atau bekerja tidak tetap sehingga tidak selalu tercatat sebagai penganggur dalam definisi TPT, atau sebaliknya, penurunan pengangguran tidak langsung diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan.
- Variabel investasi juga menunjukkan koefisien positif 0.054384, namun tidak signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa aliran investasi yang bersifat padat modal belum memberikan manfaat langsung bagi penurunan kemiskinan.

- e. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien negatif $-0,180$ yang sangat signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup memiliki dampak kuat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Regional Kalimantan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan faktor paling efektif dalam menekan kemiskinan di Kalimantan, sedangkan dinamika pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perubahan pengangguran terbuka belum menunjukkan peran kuat dalam mengurangi kemiskinan selama periode yang diteliti.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Statistik	Hasil
R-squared	0.936310
Adjusted R-squared	0.925234
F-statistic	84.53127
Prob(F-statistic)	0.000000
S.E. of regression	0.393234
Sum squared resid	7.113100
Durbin-Watson	1.043738

Sumber: data diolah 2025

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.936310 dengan Adjusted R^2 sebesar 0.925234. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 93,63% variasi perubahan tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, TPT, investasi, dan IPM, sedangkan sisanya sebesar 6,37% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Hasil olah data menggunakan *E-Views* 12 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Regional Kalimantan periode 2014–2024, dengan koefisien 0,041160 dan signifikansi 0,0423. Artinya, setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi justru meningkatkan kemiskinan sebesar 0,041160%. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan belum bersifat *pro-poor growth* dan cenderung eksklusif karena manfaatnya lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan tinggi dan sektor padat modal.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *impoverishing growth* dan *enclave economy*. Dominasi sektor pertambangan, perkebunan, dan industri ekstraktif yang bersifat *capital intensive* menyebabkan manfaat pertumbuhan tidak sepenuhnya terhubung dengan ekonomi masyarakat lokal. Kondisi ini juga berpotensi memperlebar ketimpangan. Gini Ratio Kalimantan Selatan meningkat dari 0,342 menjadi 0,346, sedangkan Kalimantan Utara meningkat dari 0,323 menjadi 0,333.

Aktivitas ekonomi ekstraktif juga dapat meningkatkan biaya hidup melalui kenaikan harga pangan, tanah, transportasi, dan perumahan. Di Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,85% pada 2014 menjadi sekitar 4,96–5,14% pada 2024, tetapi kemiskinan hanya turun dari 4,81% menjadi sekitar 4,11%.

Sementara itu, BPS (2024) mencatat garis kemiskinan Kalimantan Timur sekitar Rp853.997 per kapita per bulan, lebih tinggi dibanding Kalimantan Selatan sebesar Rp644.107. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan output ekonomi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Temuan ini bertentangan dengan *Trickle Down Effect Theory* Todaro & Smith (2020) dan kritik terhadap teori pertumbuhan klasik yang lebih menekankan peningkatan output tanpa memperhatikan pemerataan. Hasil penelitian justru sejalan dengan Ginting & Rasbin (2020) serta Ashari & Athoillah (2023) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena belum bersifat inklusif.

Kebijakan perlu diarahkan pada pertumbuhan inklusif melalui pengembangan sektor padat karya seperti pertanian modern, perikanan, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif, serta hilirisasi produk lokal, pelatihan kewirausahaan, teknologi tepat guna, dan insentif investasi yang menciptakan lapangan kerja lokal.

Pengaruh TPT terhadap Kemiskinan

Hasil *E-Views* 12 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien $-0,005222$ dan probabilitas $0,9466$. Artinya, secara statistik peningkatan TPT tidak terbukti memengaruhi kemiskinan di Regional Kalimantan.

Temuan ini tidak sejalan dengan teori ekonomi klasik Smith (1776), Ricardo (1817), dan Keynes (1936) yang menyatakan bahwa pengangguran menurunkan pendapatan dan daya beli sehingga meningkatkan kemiskinan. Namun, hasil tersebut sejalan dengan Lewis (1954) dan Todaro (1989) melalui *dual labor market theory* dan konsep *disguised unemployment*. Tingkat pengangguran terbuka yang rendah tidak selalu menunjukkan kondisi kesejahteraan yang baik karena masyarakat miskin cenderung tetap bekerja di sektor informal dengan produktivitas dan pendapatan rendah (*working poor*).

Definisi BPS yang mengategorikan seseorang sebagai bekerja apabila melakukan aktivitas ekonomi minimal satu jam dalam seminggu menyebabkan buruh harian, petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan pekerja informal tetap tercatat sebagai bekerja meskipun pendapatannya rendah. Sebaliknya, penganggur terbuka dapat berasal dari kelompok muda terdidik yang masih memperoleh dukungan keluarga dan menunggu pekerjaan formal (*voluntary unemployment*). Oleh karena itu, kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja lebih relevan daripada sekadar tingkat pengangguran.

BPS (2024) menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki TPT tertinggi sebesar 5,42%, tetapi tingkat kemiskinannya lebih rendah dibandingkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Kalimantan Tengah memiliki TPT paling rendah, tetapi tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi. Temuan ini konsisten dengan Asmi et al. (2025) dan Ariadi & Muzdalifah, (2020) di Sulawesi Selatan yang menemukan bahwa TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan akibat pengangguran terselubung dan terbatasnya pekerjaan produktif.

Kebijakan perlu berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui BLK, pendidikan vokasi, pengembangan UMKM dan wirausaha muda, penciptaan pekerjaan padat karya, serta kebijakan prioritas tenaga kerja lokal. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menekan TPT tetapi juga meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekerja.

Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan

Hasil olah data menggunakan *E-Views* 12 menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien 0,054384 dan signifikansi 0,6610. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum mampu memberikan dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan di Regional Kalimantan.

Secara teoritis, investasi diharapkan meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Namun, karakteristik investasi di Kalimantan yang banyak terkonsentrasi pada pertambangan, migas, smelter, perkebunan kelapa sawit, dan infrastruktur strategis cenderung *capital intensive*, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal relatif terbatas.

Investasi skala besar juga dapat menyebabkan alih fungsi lahan, kehilangan mata pencaharian tradisional, serta peningkatan harga tanah, perumahan, transportasi, dan kebutuhan pokok. Selain itu, terjadi *income leakage*, yaitu keuntungan perusahaan yang tidak seluruhnya berputar dalam ekonomi lokal karena mengalir ke kantor pusat di luar daerah atau ke luar negeri. Keterbatasan kualitas SDM lokal juga menyebabkan pekerjaan dengan upah tinggi lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah.

Data BKPM dan BPS (2024) menunjukkan bahwa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki realisasi investasi besar, tetapi tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Selatan yang investasinya relatif moderat. Kalimantan Selatan memiliki struktur ekonomi yang lebih banyak ditopang perdagangan, jasa, dan UMKM yang bersifat padat karya dan lebih dekat dengan masyarakat.

Temuan ini sesuai dengan pandangan Jorgenson (1963) dalam *Investment-Led Development Theory* bahwa dampak investasi terhadap kesejahteraan bergantung pada arah, kualitas, dan distribusi investasi. Investasi *capital intensive* cenderung meningkatkan output tanpa memberikan dampak sosial yang besar, sedangkan investasi *labor intensive* dan *social investment* memiliki *multiplier effect* lebih besar terhadap pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian juga sejalan dengan Supratiyoningsih & Nyoman (2022) di Bali serta Ainunnisa & Riyanto (2019) di Banten yang menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kebijakan investasi perlu diarahkan dari investasi padat modal menuju investasi padat karya berbasis sumber daya lokal, seperti agroindustri, *green investment*, energi terbarukan, dan ekonomi sirkular. Pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan lapangan kerja lokal serta memperkuat ekosistem UMKM dan investasi mikro agar manfaat investasi dapat lebih langsung meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menggunakan *E-Views* 12 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien -0,18007 dan tingkat signifikansi 0,0000. Artinya, setiap kenaikan 1 poin IPM dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,18007%.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia merupakan faktor paling efektif dalam mengurangi kemiskinan di Kalimantan. IPM mencerminkan

kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Peningkatan pendidikan meningkatkan produktivitas dan peluang memperoleh pekerjaan formal, sedangkan peningkatan kesehatan meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi beban biaya kesehatan rumah tangga. Selain itu, meningkatnya daya beli masyarakat membantu pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mengurangi jumlah penduduk miskin.

Data BPS (2024) menunjukkan hubungan yang konsisten antara IPM dan kemiskinan. Kalimantan Timur dengan IPM tertinggi sebesar 82,24 memiliki tingkat kemiskinan 5,78%, sedangkan Kalimantan Barat dengan IPM terendah sebesar 70,72 memiliki tingkat kemiskinan 6,32%. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia memiliki dampak yang lebih merata dibandingkan pertumbuhan ekonomi atau investasi yang cenderung terkonsentrasi pada sektor tertentu.

Hasil penelitian mendukung Human Capital Theory dari Becker (1964) yang menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Temuan ini juga sejalan dengan Human Development Theory dari Sen (1999) yang menekankan bahwa pembangunan harus memperluas kemampuan (*capabilities*) manusia untuk hidup produktif dan sejahtera.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Saputra (2024) di Palopo, Arofah & Sishadiyati (2022) di Jember, Hasan (2021) di Indonesia, Rodliyah (2023) di Jawa, dan Mirantika et al. (2025) di Bener Meriah yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kebijakan yang direkomendasikan adalah peningkatan kualitas pendidikan vokasional dan digitalisasi sekolah, penguatan layanan kesehatan dasar dan gizi masyarakat, serta pengembangan ekonomi berbasis manusia (*human-centered development*) melalui pemberdayaan wirausaha lokal.

Pengaruh Simultan Pertumbuhan Ekonomi, TPT, Investasi, dan IPM terhadap Kemiskinan

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Investasi, dan IPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Regional Kalimantan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ dan $P\text{-Value} < 0,05$.

Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menurunkan kemiskinan apabila tidak disertai pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Demikian pula, investasi yang besar belum tentu efektif menurunkan kemiskinan apabila bersifat padat modal dan kurang menyerap tenaga kerja lokal.

Temuan ini mendukung model pembangunan dan kemiskinan dari Todaro & Smith (2020) yang menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, investasi produktif, kesempatan kerja, dan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan kualitas SDM berpotensi menghasilkan ketimpangan, sedangkan peningkatan IPM tanpa dukungan investasi dan lapangan kerja tidak akan optimal dalam menurunkan kemiskinan.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi, TPT, Investasi, dan IPM mampu menjelaskan variasi kemiskinan sebesar 92,52%, sedangkan 7,48% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi Kalimantan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan faktor paling efektif dalam menurunkan kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi dan investasi belum memberikan dampak optimal serta TPT tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara holistik melalui beberapa dimensi pembangunan.

Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Transformasi SDM, Peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan melalui pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri, kolaborasi *Quadruple Helix* antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat, serta pengembangan keterampilan menuju *green jobs*, seperti energi terbarukan, rehabilitasi lahan pascatambang, pertanian organik, dan ekowisata. Perlindungan kelompok *working poor* juga perlu diperkuat melalui jaminan sosial bagi pekerja informal.

Transformasi Ekonomi dan Investasi Inklusif, Investasi perlu diarahkan pada sektor padat karya dan berbasis sumber daya lokal melalui *inclusive structural transformation*. Hilirisasi perlu diperluas tidak hanya pada sektor pertambangan, tetapi juga agroindustri, perikanan, kehutanan sosial, dan ekonomi kreatif. Investasi berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*) serta keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri perlu diperkuat agar manfaat investasi lebih merata.

Infrastruktur Inklusif dan Digitalisasi, Pembangunan infrastruktur perlu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan jalan produksi (*farm to market roads*), konektivitas antarwilayah, serta akses internet di daerah terpencil. Pembangunan IKN juga perlu dimanfaatkan untuk menciptakan *spillover effect* ekonomi melalui penguatan rantai pasok pangan, logistik, material, dan jasa di seluruh Kalimantan.

Perlindungan Sosial Adaptif dan Ketahanan Kesehatan, Pemerintah perlu mengembangkan Adaptive Social Protection (ASP) yang mampu merespons krisis ekonomi, bencana, fluktuasi harga, dan kehilangan pekerjaan. Di bidang kesehatan, percepatan penurunan *stunting* melalui pemanfaatan pangan lokal dapat meningkatkan kualitas SDM sekaligus mendukung pendapatan petani dan nelayan.

BAB ITata Kelola Pembangunan dan Reformasi Kelembagaan

Pengentasan kemiskinan perlu diperkuat melalui pendekatan *whole of government* dengan mengintegrasikan APBN, APBD, Dana Desa, CSR, dan investasi swasta. Reformasi data kemiskinan berbasis spasial melalui integrasi DTKS dan GIS juga diperlukan agar program lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, penanggulangan kemiskinan di Kalimantan tidak cukup mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi perlu menempatkan pembangunan manusia sebagai pusat kebijakan. Strategi tersebut harus didukung transformasi ekonomi inklusif, peningkatan kualitas pekerjaan, pemerataan infrastruktur, perlindungan sosial adaptif, dan tata kelola yang terintegrasi untuk menciptakan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan.

Cross-Section Effect (Efek Antarprovinsi)

Hasil estimasi model *Fixed Effect* (FEM) menunjukkan adanya perbedaan efek tetap antarprovinsi di Kalimantan. Efek tetap menggambarkan karakteristik khusus tiap provinsi yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, TPT,

investasi, dan IPM, seperti struktur ekonomi, kondisi geografis, kebijakan sosial, tingkat industrialisasi, dan efektivitas pemerintahan daerah.

Kalimantan Timur memiliki konstanta tertinggi sebesar 19,2197, yang menunjukkan tingkat kemiskinan struktural paling tinggi setelah dikontrol oleh variabel penelitian. Kondisi ini berkaitan dengan dominasi sektor ekstraktif yang padat modal, ketimpangan antara kawasan industri dan pedalaman, serta terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal. Sebagai pusat investasi dan pembangunan IKN, kebijakan perlu mengintegrasikan investasi dengan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM.

Kalimantan Utara memiliki konstanta 19,0365, tertinggi kedua, yang mencerminkan kemiskinan struktural-transisional akibat karakteristik sebagai provinsi baru, keterisolasian wilayah, tingginya biaya logistik, keterbatasan infrastruktur, serta belum meratanya pendidikan dan kesehatan. Kebijakan perlu memprioritaskan pembangunan manusia, layanan dasar, peningkatan keterampilan, dan investasi padat karya.

Kalimantan Barat memiliki konstanta 18,8992, sedikit di atas rata-rata. Kondisi ini menunjukkan adanya kemiskinan struktural yang dipengaruhi luasnya wilayah pedesaan, keterbatasan akses pasar dan infrastruktur, dominasi sektor primer berproduktivitas rendah, serta tingginya pekerjaan informal. Kebijakan perlu diarahkan pada pemerataan pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi perdesaan, pertanian bernilai tambah, dan UMKM lokal.

Kalimantan Tengah memiliki konstanta 17,3269, berada di bawah rata-rata Kalimantan. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemiskinan struktural yang relatif lebih rendah dan didukung oleh ketahanan konsumsi masyarakat, kohesi sosial, serta tekanan urbanisasi dan ketimpangan yang relatif lebih rendah. Kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil, serta pengembangan agroindustri dan ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja.

Kalimantan Selatan memiliki konstanta terendah sebesar 16,6216, yang menunjukkan tingkat kemiskinan struktural paling rendah di antara provinsi Kalimantan. Kondisi ini sejalan dengan data BPS (2024) yang mencatat tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan sebesar 4,47%, terendah di wilayah Kalimantan. Struktur ekonomi yang lebih beragam melalui perdagangan, jasa, industri kecil, dan pertanian produktif serta perkembangan UMKM dan sektor informal produktif menjadi faktor pendukung. Kebijakan perlu mempertahankan capaian tersebut melalui diversifikasi ekonomi, penguatan industri pengolahan, serta peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Regional Kalimantan belum bersifat inklusif. TPT dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi faktor penting dalam menurunkan kemiskinan.

Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, TPT, investasi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Regional Kalimantan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, disertai pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan

kualitas pekerjaan, serta investasi yang mendukung ekonomi lokal agar penurunan kemiskinan berlangsung berkelanjutan.

Saran

Pemerintah daerah di Regional Kalimantan perlu memprioritaskan pembangunan manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta standar hidup, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan, dengan mengoptimalkan Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, Jaminan Kesehatan Nasional, dan Program Percepatan Penurunan Stunting secara berbasis wilayah. Pertumbuhan ekonomi juga perlu diarahkan agar lebih inklusif melalui penguatan UMKM, ekonomi desa, KUR, Dana Desa, BUMDes, dan digitalisasi UMKM sehingga masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penurunan pengangguran, tetapi juga peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan melalui pendidikan vokasi, BLK, Kartu Prakerja, dan sertifikasi kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor unggulan Kalimantan. Investasi perlu diarahkan pada sektor padat karya dan bernilai tambah dengan memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal dan UMKM melalui *local content*, pemanfaatan CSR, serta pengembangan kawasan industri dan hilirisasi sumber daya alam agar manfaat investasi lebih langsung dirasakan masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel yang mencerminkan aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan, seperti ketimpangan pendapatan, inflasi daerah, belanja sosial pemerintah, kualitas infrastruktur, dan akses layanan publik. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan model panel dinamis, seperti *Generalized Method of Moments* (GMM), untuk menangkap dinamika jangka panjang dan hubungan timbal balik antarvariabel serta memperoleh pengujian kausalitas yang lebih kuat. Selain itu, unit analisis dapat diturunkan hingga tingkat kabupaten/kota atau desa dengan menggunakan pendekatan spasial agar variasi kemiskinan dapat ditangkap secara lebih akurat, mengingat karakteristik Kalimantan yang beragam dari sisi geografis, aksesibilitas, dan struktur ekonomi lokal

5. Daftar Pustaka

- Ainunnisa, V., & Riyanto, W. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Investasi, Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 3(1), 140–152. <https://doi.org/10.22219/jie.v3i1.10426>
- Ammaliah, N., & Suherty, L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2020. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 7(1), 81–92.
- Ariadi, V. N., & Muzdalifah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 485–499.
- Arofah, F. M., & Sishadiyati, S. (2022). Peranan Mediasi IPM Pada Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2020. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, VI(Vol 6 No 2), 168–178. <https://doi.org/10.23969/oikos.v6i2.5559>

- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis Pengaruh TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk. *Journal Of Development and Social Studies*, 2(2), 313–326.
- Asmi, N., Fuady, N., & Padilah, S. (2025). Determinants of Poverty: The Role of Unemployment and Labor Force Participation in South Sulawesi. *Islamic Economics, Business Management, And Accounting*, 1(1).
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (Vol. 3). University of Chicago Press Chicago.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Ginting, A. M., & Rasbin, R. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 279–312.
- Hasan, Z. (2021). the Effect of Economic Growth And Human Development Index On Poverty In Indonesia. *Economics and Sustainability*, 3(1), 42–53.
- Jorgenson, D. W. (1963). Capital theory and investment behavior. *The American Economic Review*, 53(2), 247–259.
- Mirantika, Nasution, L. N., & Efendi, B. (2025). The Influence of Human Development Index on Economic Growth , Unemployment , and Poverty Reduction in Bener Meriah Regency : A Path Analysis Approach. *2025: 2nd International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*, 350–356.
- Ricardo, D. (1821). *On the principles of political economy*. J. Murray London.
- Rodliyah, D. (2023). The Effect of HDI, Unemployment, and Investment on GRDP and Poverty. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 6(2), 199–209. <https://doi.org/10.15294/efficient.v6i2.59000>
- Saputra, A. R. (2024). Between Regional Government Capital Expenditures, Human Development Index And Labor Absorption On Poverty And Economic Growth In Palopo City. *Business, Education, Health, and ...*, 1(1), 421–429. <http://journal.conference.umpalopo.ac.id/index.php/icbens/article/view/47>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=NQs75PEa618C>
- Smith, A. (1793). *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: By Adam Smith,...* (Vol. 1). William Porter.
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67, 18.
- Supratyoningsih, L., & Nyoman, N. (2022). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(01), 1–14.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>